

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Armaeny Azis dan Izlindawati, 2019, "Constitutional Complaint & Constitutional Question Dalam Negara Hukum", Prenamadia Group, Jakarta.

A Salman Maggalantunf, 2016, 'Desain Kelembagaan Negara Pasca Amandemen UUD 1945', Gramata Publishing, Jakarta.

Nomensen sinamo.2016. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*. Jala Permata Aksara, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, kencana, Jakarta.

R. Wiyono,2013. *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.

Sirajudin dan Winardi,2015, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*" Setara Pers, Malang.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, UNPAM PRES, Tangerang Selatan.

S.M. Amin, 2009 *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 2005 *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Wan HR, 2011, " *Hukum Administrasi Negara*",PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Zainal Arifin Oesein, 2016,” *kekuasaan kehakiman di Indonesia*”, Rajawali Pers,  
Malang.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman

UU No. 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara

## **JURNAL**

Jurnal Hukum dan peradilan, *Model Penyelesaian Persilihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal* (Vol.5 No.1 Maret 2016).

Jurnal Fundamental Justica,*Tinjauan Yuridis Terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Yang Merupakan Perbuatan Hukum* (Vol.1 no.2, April 2020).

Jurnal hukum republica, *Analisis Pertimbangan Hukum Hakim PTUN Terhadap Keputusan Pergantian Aantara Waktu Anggota Legislatif* (Vol-19 Nomor 2, April 2020).

Jurnal Justitia, *Kewenangan Serta Objek Sengketa Di Peradilan Tata Usaha Negara Setelah Ada UU No. 30 /2014 Tentang Administrasi Pemerintahan* (Vol 44 No 4 Oktober 2021).

Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, *Peran Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik* (Vol 1 No 1 Maret 2021)..

Jurnal Volksgeist, *Recall Referendum sebagai alternatif proses pengantian antarwaktu lembaga legislatif di indonesia* (Vol 4 No. 1 Juni 2021).

Jurnal Administrasi pemerintahan, *Peran bagian otonomi daerah sekretariat daerah dalam mengatasi problematika penggantian antar waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/kota* (Vol.2 No.2 tahun 2022 )